

KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP

Dorong Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

JAKARTA, KOMPAS — Rehabilitasi daerah aliran sungai perlu makin intensif dilakukan. Di tengah pandemi Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona baru, upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pemulihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kondisi perekonomian warga sekitar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuturkan, pemulihan lingkungan hidup menjadi agenda prioritas dalam target pembangunan nasional dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) menjadi salah satu indikator dalam pemulihan lingkungan tersebut.

Sejauh ini, Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas 189 juta hektar lebih, dan 14,3 juta hektar di antaranya merupakan lahan kritis yang harus ditangani dan ditanami kembali. "Presiden telah memberikan arahan yang kuat untuk melakukan pemulihan lahan kritis secara signifikan, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan," katanya, di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Siti Nurbaya menambahkan, kegiatan pemulihan lingkungan dengan rehabilitasi lahan dan hutan bertujuan mengendalikan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan melalui daya dukung DAS. Selain itu, pemulihan ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pemulihan lahan kritis, pada tahun 2019 penanaman pada area seluas 207.000 hektar telah dilaksanakan. Luasan lahan itu dinilai signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dengan rata-rata penanaman sekitar 25.000 hektar. Adapun luas kewajiban rehabilitasi DAS di Indonesia 560.719,76 hektar.

Pemerintah menargetkan luas rehabilitasi lahan dan hutan pada DAS tahun 2020 mencapai 56.000 hektar. Sementara itu, total tanaman yang direalisasikan pada area DAS sampai Agustus 2020 sebesar 105.202 hektar.

Pengaman sosial

Kegiatan rehabilitasi DAS menjadi salah satu upaya mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Itu artinya selain memperbaiki kondisi lingkungan, rehabilitasi DAS dapat sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan itu.

"Di masa pandemi Covid-19, kegiatan rehabilitasi DAS menjadi amat penting mengingat terdapat manfaat langsung yang diterima masyarakat. Itu berupa upah kerja harian saat pengerjaan dilakukan," ujarnya.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto menyampaikan, rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Hal ini disebabkan aktivitas yang dilakukan pemegang IPPKH bisa menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan, seperti pada aktivitas pertambangan.

"Para pemegang IPPKH dibebani dengan kewajiban menanggulangi dan meminimalkan kerusakan hutan seperti dengan rehabilitasi DAS. Selain itu, mereka harus melakukan reklamasi dan vegetasi di areal IPPKH akibat pembukaan lahan yang dilakukan," ujarnya.

Reboisasi

Selain itu, pemegang IPPKH wajib melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, memulihkan lingkungan hidup, dan mencegah kebakaran hutan, serta memberdayakan masyarakat setempat terutama di masa pandemi saat ini. Untuk rehabilitasi DAS, para pemegang IPPKH harus melaporkan secara berkala luasan lahan dan hutan yang telah direhabilitasi.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sulistya Hastuti Wahyu mengatakan, industri minyak dan gas bumi atau migas serta pertambangan mengalami stigma di masyarakat sebagai industri ekstraktif yang tidak ramah lingkungan. Padahal, selama ini tidak sedikit perusahaan migas dan pertambangan yang berkomitmen nyata untuk memulihkan lingkungan hidup dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi.

"SKK Migas bersama 12 kontraktor kontrak kerja sama sedang melakukan kegiatan rehabilitasi DAS dengan total luasan 6.034 hektar yang tersebar di 16 lokasi. Dalam kegiatan rehab DAS ini, kami senantiasa melibatkan masyarakat di sekitar lokasi," ucapnya. (TAN)

Dorong Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

JAKARTA, KOMPAS — Rehabilitasi daerah aliran sungai perlu makin intensif dilakukan. Di tengah pandemi Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona baru, upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pemulihan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kondisi perekonomian warga sekitar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuturkan, pemulihan lingkungan hidup menjadi agenda prioritas dalam target pembangunan nasional dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) menjadi salah satu indikator dalam pemulihan lingkungan tersebut.

Sejauh ini, Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas 189 juta hektar lebih, dan 14,3 juta hektar di antaranya merupakan lahan kritis yang harus ditangani dan ditanami kembali. "Presiden telah memberikan arahan yang kuat untuk melakukan pemulihan lahan kritis secara signifikan, antara lain dengan rehabilitasi hutan dan lahan," katanya, di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Siti Nurbaya menambahkan, kegiatan pemulihan lingkungan dengan rehabilitasi lahan dan hutan bertujuan mengendalikan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan melalui daya dukung DAS. Selain itu, pemulihan ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pemulihan lahan kritis, pada tahun 2019 penanaman pada area seluas 207.000 hektar telah dilaksanakan. Luasan lahan itu dinilai signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dengan rata-rata penanaman sekitar 25.000 hektar. Adapun luas kewajiban rehabilitasi DAS di Indonesia 560.719,76 hektar.

Pemerintah menargetkan luas rehabilitasi lahan dan hutan pada DAS tahun 2020 mencapai 56.000 hektar. Sementara itu, total tanaman yang direalisasikan pada area DAS sampai Agustus 2020 sebesar 105.202 hektar.

Pengaman sosial

Kegiatan rehabilitasi DAS menjadi salah satu upaya mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Itu artinya selain memperbaiki kondisi lingkungan, rehabilitasi DAS dapat sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan itu.

"Di masa pandemi Covid-19, kegiatan rehabilitasi DAS menjadi amat penting mengingat terdapat manfaat langsung yang diterima masyarakat. Itu berupa upah kerja harian saat pengerjaan dilakukan," ujarnya.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto menyampaikan, rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Hal ini disebabkan aktivitas yang dilakukan pemegang IPPKH bisa menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan, seperti pada aktivitas pertambangan.

"Para pemegang IPPKH dibebani dengan kewajiban menanggulangi dan meminimalkan kerusakan hutan seperti dengan rehabilitasi DAS. Selain itu, mereka harus melakukan reklamasi dan vegetasi di areal IPPKH akibat pembukaan lahan yang dilakukan," ujarnya.

Reboisasi

Selain itu, pemegang IPPKH wajib melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, memulihkan lingkungan hidup, dan mencegah kebakaran hutan, serta memberdayakan masyarakat setempat terutama di masa pandemi saat ini. Untuk rehabilitasi DAS, para pemegang IPPKH harus melaporkan secara berkala luasan lahan dan hutan yang telah direhabilitasi.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sulistya Hastuti Wahyu mengatakan, industri minyak dan gas bumi atau migas serta pertambangan mengalami stigma di masyarakat sebagai industri ekstraktif yang tidak ramah lingkungan. Padahal, selama ini tidak sedikit perusahaan migas dan pertambangan yang berkomitmen nyata untuk memulihkan lingkungan hidup dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi.

"SKK Migas bersama 12 kontraktor kontrak kerja sama sedang melakukan kegiatan rehabilitasi DAS dengan total luasan 6.034 hektar yang tersebar di 16 lokasi. Dalam kegiatan rehab DAS ini, kami senantiasa melibatkan masyarakat di sekitar lokasi," ucapnya. (TAN)

